

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada 1997 bangsa Indonesia mengalami krisis moneter yang meluluhlantakkan segala sendi perekonomian Indonesia. Krisis yang dimulai dari Thailand pada Juli 1997 ini berdampak besar pada nilai tukar, bursa saham, serta harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Efek domino dari krisis finansial ini menyebabkan krisis multidimensi yang menyeret aspek lain yakni sosial dan politik (Suta, 2003:216). Berbeda dengan beberapa negara ASEAN yang lain seperti Malaysia, Thailand, serta Filipina yang juga terkena dampak krisis moneter ini namun dengan cepat dapat mengatasinya, Indonesia dapat dibilang sulit keluar dari badai krisis. Terlihat dari pertumbuhan riil *Gross Domestik Bruto* (GDP) Indonesia dari tahun 1990an hingga sebelum krisis terjadi menunjukkan rata-rata pertumbuhan di atas 7%. Setelah krisis terjadi (1998), GDP Indonesia turun drastis hingga minus 13,7%, dan dari tahun 1999 hingga 2007 pertumbuhannya hanya berputar pada rata-rata 4,9% (Salamah, 2001:65).

Indikator lain yang menunjukkan sulitnya Indonesia mengatasi krisis ini adalah semakin lemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Jika pada sebelum krisis nilai tukar rupiah paling tinggi berada di angka Rp2.682/dolar AS, pada awal semester 2001 di luar prediksi pemerintah yang mematoknya tidak akan jauh dari Rp7.000, maka realitanya nilai tukar rupiah telah menembus Rp11.000. Dengan kata lain, nilai rupiah telah terdepresiasi lebih dari 300% (Salamah, 2001:65). Satu dekade pasca krisis moneter yang menerpa bangsa Indonesia, tepatnya 2008, krisis ekonomi kembali melanda negeri yang baru selesai berbenah diri. Bukan

hanya berdampak pada beberapa negara Asia, krisis ekonomi kali ini telah menorehkan kenangan pahit bahkan bagi perekonomian dunia. Bisa jadi akan selalu dikenang sebagai fragmen gelap oleh masyarakat dunia sebagai sejarah terpelik ekonomi global selain *Great Depression*, 1930-an (Hamidi, 2012:21).

Krisis tersebut membuat *collapse* perusahaan-perusahaan papan atas dunia semisal Bank of America, Citigroup, Washington Mutual Bank, American International Group (AIG), Goldman Sachs, Merrill Lynch, Freddy Mac, dengan aset triliunan dollar. Seorang spekulator ternama, George Soros, menggambarkan kondisi ini sebagai akhir dari *super bubble* yang diciptakan dan digerakkan oleh ekspansi kredit masa-masa sebelumnya (Hamidi, 2012:22). Para pakar ekonomi telah sepakat seperti Joseph E. Stiglitz, pemenang hadiah nobel bahwa penyebab utama terjadinya krisis global 2008 adalah kasus *subprime mortgage* yang terjadi sejak 2007. Longgarnya kredit menjadi pemicu utamanya (Bank Indonesia, 2010:2). Dikatakan longgar karena dalam pelaksanaannya kredit rumah ini dapat diberikan kepada siapa saja bahkan kepada mereka yang memiliki rapor merah terkait tingkat kemampuan dalam pembayaran utangnya. Dengan kata lain, risiko gagal bayarnya lebih besar.

Kebijakan tersebut terus dilakukan hingga pada 7 September 2008, pemerintah Amerika Serikat mengambil alih sebuah perusahaan pemberi kredit rumah bernama Fannie Mae. Perusahaan ini bangkrut akibat mayoritas pembiayaannya dialokasikan pada *supprime mortgage* yang berakhir *default*. Disusul oleh Freddy Mac pada 12 September, kemudian diikuti Lehman Brothers pada tanggal 15 Septemhernya. Lehman Brothers ini merupakan perusahaan jasa keuangan yang operasionalnya bergerak di bidang *Investment Banking*. Kebangkrutannya juga menyeret Hedge Funds dan perusahaan asuransi yang

menjadi penjaminnya seperti AIG (Hamidi, 2012:22-23). Badai krisis ekonomi dan keuangan global pasca hancurnya perusahaan-perusahaan raksasa di atas menciptakan dampak yang luar biasa di pasar keuangan global, dan yang terparah tentu saja di AS, sebagai negara pemicu krisis. 14,5 triliun dolar kekayaan rumah tangga lenyap atau sekitar 33 persen dari total nilai perusahaan di seluruh dunia dan lebih dari 6 juta rakyatnya terpaksa kehilangan pekerjaan (Pittman dan Irvy, 2009).

Meski tidak menjadi penyebab krisis, Indonesia juga merupakan negara yang mendapat dampak dari krisis. Menghancurkan segera sektor perekonomian termasuk dunia perbankan. Sebagaimana disampaikan oleh Suta dan Musa (2003:xxii), bahwa krisis ekonomi yang melanda suatu negara sangat erat kaitannya dengan krisis perbankan seperti yang terjadi pada krisis akhir dekade tahun 1990-an. Krisis perbankan pada saat itu menimbulkan dampak yang sangat buruk para perekonomian negara-negara di Asia. Akibat krisis ini, di berbagai negara aliran dana serta kredit terhenti serentak, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat tidak bergerak. *capital outflow* atau aliran dana keluar terjadi besar-besaran. Indonesia yang pada saat itu tidak memberlakukan kebijakan penjaminan dana nasabah secara menyeluruh, menderita *capital outflow* lebih parah daripada negara-negara tetangga yang menerapkan *blanket guarantee* atau penjaminan dana nasabah secara penuh. Membuat likuiditas di dalam negeri semakin kering dan perbankan Indonesia mengalami kesulitan mengelola arus dananya (Bank Indonesia, 2010:7).

Seakan tidak mau berhenti, efek domino krisis terus bergerak menyeret runtuhnya berbagai lini sektor keuangan negara. Oktober 2008, giliran bank-bank Indonesia dengan skala besar yang terkena dampaknya. Terbukti dari tiga bank

besar BUMN yang meminta bantuan likuidasi dari pemerintah dengan besaran dana masing-masing senilai Rp 5triliun. Ketiga bank tersebut antara lain, PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk. serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dana Rp 15triliun tersebut berasal dari dana pemerintah yang berada di Bank Indonesia dengan maksud memperkuat cadangan modal bank tanpa harus terganggu likuiditasnya dan agar bank-bank berpelat merah tersebut tidak meminjam dana keluar negeri. Namun tentu saja yang paling menderita adalah bank-bank kecil dan menengah. Bank-bank ini mengalami penurunan dana simpanan masyarakat secara signifikan karena masyarakat menarik dananya besar-besaran (Bank Indonesia, 2010:8).

Perbankan memiliki posisi yang sangat strategis dalam hal ketahanan suatu negara menghadapi krisis. Permasalahan kecil dalam dunia perbankan yang muncul hampir dipastikan akan berpengaruh luas ke berbagai sektor ekonomi lainnya yang pada ujungnya akan mempengaruhi ekonomi secara nasional. Di lain kesempatan, Sabirin (2003:396), mantan Gubernur Bank Indonesia 1998-2003, menegaskan pentingnya menciptakan industri perbankan yang kokoh agar dapat bertahan di tengah badai krisis yang akan menerpa selanjutnya. Beliau menambahkan dalam harapannya agar industri perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah harus terus dikembangkan sejalan dengan perbankan konvensional. Karena pada perbankan syariah, prinsip yang diasaskan adalah produktifitas (*productivity*), kedermawanan (*generosity*), keadilan (*justice*), kesederhanaan atau efisiensi, dan moralitas (*morality*). Kesemua asas itulah yang menjadi bagian penting guna menciptakan dan memelihara stabilitas perekonomian dan kehidupan sosial, baik dalam negeri maupun tingkat internasional (Sabirin, 2003:397).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah bank sebagaimana perbankan secara umum yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hanya saja dalam perbankan syariah menghilangkan praktik riba yang tercermin dalam bunga bank serta menerapkan zakat dalam operasionalnya. Selain menghindari praktik riba, praktik lain yang dilarang dalam Islam seperti ketidakjelasan (*gharar*), dan penipuan atau spekulasi *maysir* (*maysir*). Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mensejahterahkan umat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui penyaluran dananya kepada sektor-sektor riil. Rifai dan Veithzal (2008:78), mengatakan di saat perbankan konvensional dipusingkan oleh krisis moneter dan membutuhkan biaya besar untuk memulihkan dan mempertahankan lembaganya, perbankan syariah bisa tampil untuk menyelamatkan sebagian perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan Rifai dan Veithzal (2008), Sabbina (2014:3), menyebutkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan telah menjadi pertanda berhasilnya eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi tahun 1998 telah menghancurkan hampir seluruh perbankan konvensional dan membuat mereka harus dilikuidasi karena gagal membayarkan bunganya. Sedangkan perbankan yang menjalankan operasinya dengan sistem bebas bunga (*free interest*) mampu bertahan. Begitu pula saat krisis global terjadi tahun 2008, perbankan syariah kembali menunjukkan ketahanannya. Berbagai lembaga keuangan syariah tetap dapat memberikan keuntungan, keamanan, dan kenyamanan kepada para nasabahnya serta kepada para pemegang sahamnya Sabbina (2014:4).

Kemampuan survival perbankan syariah ini menarik perhatian banyak peneliti untuk melakukan riset guna memastikan apakah benar perbankan syariah

lebih tahan terhadap krisis daripada perbankan konvensional. Ahmad dan Pandey (2010), meneliti tentang indikator kinerja keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional di negara-negara Teluk (Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman). Hasilnya menunjukkan dari ketujuh rasio yang digunakan sebagai indikator perbandingan, lima indikator diantaranya menyatakan bahwa perbankan syariah di negara-negara Teluk lebih baik daripada perbankan konvensional selama krisis. Kelima indikator tersebut antara lain, pertumbuhan aset dan liabilitas, efisiensi, rasio kapitalisasi, rasio leverage, dan rasio likuiditas.

Selanjutnya Seid (2012), membuktikan bahwa semua bank tidak bisa dipungkiri terkena dampak krisis global sedikit atau banyak. Selain hal itu, penelitian ini menyatakan bahwa rasio kecukupan modal yang diproyeksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki hubungan positif yang kuat pada kinerja bank konvensional. Sementara profitabilitas bank syariah tidak terpengaruh dengan CAR ketika kita mengambil *Return On Equity* (ROE) sebagai variabel dependen. Ini karena bank syariah tidak mengikuti seluruh kebijakan Basel. Selain itu, tidak seperti bank konvensional, efisiensi manajemen memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja bank syariah dan ini adalah karena portofolio kredit bank syariah didasarkan pada hukum Islam (syariah). Syariah melarang penerimaan bunga atau biaya untuk pinjaman uang. Efisiensi manajemen tidak mempengaruhi bank konvensional karena bank konvensional terlalu serakah, mereka biasanya melakukan apa pun untuk mendapatkan keuntungan mereka yang berarti bahwa perilaku etis tidak banyak diterapkan di bank konvensional. Di akhir penelitiannya, Seid menutup kesimpulannya dengan pernyataan bahwa krisis keuangan memiliki dampak positif pada kinerja bank konvensional di sisi lain tidak ada signifikansi atau dampak yang besar pada kinerja bank syariah selama

krisis karena mereka tidak terlibat dalam transaksi spekulatif dan itu dilarang. Itu semua menjelaskan mengapa siklus hidup bank syariah tidak banyak terpengaruh dari resesi.

Selama krisis, bank syariah memiliki tingkat likuiditas lebih tinggi. Rasio likuiditas yang lebih tinggi dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional bisa karena keterbatasan ruang lingkup investasi perbankan syariah, yakni kepada sektor-sektor riil masyarakat. Tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum, selama, dan setelah krisis keuangan global pada rasio likuiditas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah memegang persentase yang lebih tinggi dari deposito dan dana jangka pendek untuk memenuhi penarikan tiba-tiba. Selain itu, kecukupan modal bank syariah relatif stabil, Memiliki kapasitas yang cukup besar menyerap kerugian pinjaman karena dibiayai dan tergantung pada hubungan pembagian laba dan rugi daripada hubungan utang-kredit seperti bank konvensional. Dengan kata lain, sektor perbankan syariah telah melakukan operasionalnya dengan baik selama krisis keuangan, berdasarkan prinsip-prinsip yang khas dan didukung aset pembiayaan (Tabash dan Dhankar, 2014).

Banyak sekali peneliti yang telah meneliti stabilitas perbankan setelah adanya guncangan perekonomian atau kondisi yang berbeda. Terutama pasca krisis global 2008. Indikator yang digunakanpun beragam. Tergantung kepada latar belakang dan rujukan yang dipakai oleh masing-masing peneliti. Namun setelah mengumpulkan banyak penelitian, indikator-indikator tersebut mengerucut pada lima indikator pokok sebagaimana telah dipakai oleh Cornet dan Tehranian (1992); Cornet *et al.*, (2002), Wibowo (2015). Kelima indikator tersebut antara lain, profitabilitas, kecukupan modal, efisiensi operasional, risiko likuiditas, dan pertumbuhan aset.

Krisis yang terjadi tahun 2008 tersebut adalah peringatan keras bagi masyarakat dunia sepanjang sejarah. Namun hampir pasti, krisis ini bukanlah yang terakhir. Akan ada krisis-krisis selanjutnya yang bisa jadi akan lebih besar dari *The Global Financial Mealtdown* ini. Karena setiap krisis yang terjadi tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Seperti halnya penyakit yang hanya dibersihkan luka dan nanahnya saja, namun penyebab penyakitnya tidak pernah dibuang (Hamidi, 2012:33). Kebanyakan penelitian yang dilakukan untuk melihat ketahanan perbankan syariah terhadap krisis mengambil sampel di negara-negara dengan sistem perbankan syariah yang kuat dan memiliki pangsa pasar (*market share*) yang luas seperti Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UEA, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan melihat perjalanan hampir satu dekade perbankan syariah pasca krisis 2008 di beberapa negara dengan membandingkan antara negara dengan sistem perbankan syariah yang kuat dan negara yang bisa dibilang masih lemah dengan market share perbankan syariahnya yang rendah. Penelitian ini berjudul “Stabilitas Perbankan Syariah Pasca Krisis Global 2008: Studi Komparasi Tiga Negara (Indonesia, Iran, dan Inggris)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat penulis rumuskan permasalahannya adalah apakah terdapat perbedaan stabilitas perbankan syariah sebelum, selama, dan setelah krisis global 2008 antara ketiga negara (Indonesia, Iran, dan Inggris)?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk turut serta memberikan kontribusi wacana, pemikiran, dan kajian terhadap stabilitas perbankan syariah. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui stabilitas Perbankan Syariah sebelum, selama, dan setelah krisis global 2008 di tiga negara. Karena mengingat sebuah krisis dapat sewaktu-waktu dapat terjadi pada suatu negara. Perbankan yang memiliki peranan penting dalam sebuah kondisi perekonomian, harus terus dievaluasi agar dapat menjadi senjata untuk menghadapi krisis tersebut. Dari kondisi tersebut, maka lahirlah penelitian ini.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun praktisi. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tentang perbankan syariah dan ketahanannya terhadap krisis. Sedangkan manfaat bagi praktisi adalah hasil dari penelitian ini menjadi gambaran kondisi perbankan syariah dan pentingnya untuk mengembangkan perbankan syariah yang diharapkan dapat meminimalkan potensi krisis. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi untuk dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah dari negara-negara lain dan memperbaiki manajemen risiko saat krisis kembali terulang. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran dalam pengembangan potensi perbankan syariah selanjutnya.